

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN BALITBANGDA KOTA MAKASSAR
BEKERJA SAMA STIA LAN MAKASSAR



EVALUASI RPJMD KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019

Tim Peneliti

Nama

Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi.,M.Si

Erwin Musdah, S.I.P.,M.I.P.

MAKASSAR

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Batasan Penelitian.....	5
1.6. Indikator Keberhasilan	5
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	7
2.1. Kajian Literatur	7
2.2. Jadwal Penelitian	12
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1. Desain Penelitian	13
3.2. Populasi, Sampel dan Lokasi Penelitian	13
3.3. Instrumen yang Digunakan	13
3.4. Metode Analisis Data.....	14
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	15
4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian	15
4.2. Indikator Keberhasilan Sub Misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019.....	16
4.3. Pencapaian Kinerja Sub Misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019	48
4.4. Analisis Keberlanjutan Program RPJMD	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mewajibkan pemerintah daerah memiliki dokumen perencanaan pembangunan, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 – 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan dan berlaku selama satu tahun. Setiap proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut memerlukan koordinasi antara Instansi Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder/pelaku pembangunan yang ada di daerah.

Setelah keluarnya UU Nomor 25 Tahun 2004 kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) seperti PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen-dokumen perencanaan secara konsisten baik dari sisi struktur maupun substansi/isi pokok penjabarannya. Keberadaan UU tersebut dijadikan dasar dan landasan hukum bagi para perencana di daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan di daerah.

Permasalahan yang terkait perencanaan tidak lantas selesai ketika Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 diimplementasikan. Meskipun sudah tersedia peraturan yang mengatur secara teknis tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah, namun dalam realitasnya masih cukup banyak daerah yang kapasitasnya terbatas dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Paling tidak dapat diidentifikasi 2 persoalan utama, yaitu; persoalan non teknis dan persoalan teknis. Di antara persoalan non teknis perencanaan adalah lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, keterbatasan data dari masing-masing SKPD, lemahnya kapasitas sumber daya perencanaan di daerah. Persoalan teknis perencanaan antara lain adalah lemahnya konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, tidak jelasnya indikator sasaran untuk masing-masing program dan kegiatan. Beberapa persoalan tersebut apabila tidak dicari solusi alternatif yang tepat dikhawatirkan akan dapat menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas pembangunan di daerah (Suparjan dan Nurwita, 2011).

RPJMD sebagai dokumen penting, maka setiap implementasinya wajib dievaluasi sehingga permasalahan maupun keberhasilan RPJMD dapat diidentifikasi dan dijadikan acuan bagi proses pembangunan ke depan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien seharusnya ditunjukkan oleh sejauh mana daerah dapat menjaga konsistensi dengan baik setiap penjabaran kebijakan ke dalam berbagai program yang relevan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 yang dilaksanakan oleh Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar Bapak Ir. Moh. Ramdhani Pomanto dan Bapak Dr. Syamsul Rizal, MI telah berjalan selama 4 Tahun. Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD tahun 2014 – 2019 berkaitan langsung dengan janji politik Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar terpilih. Adapun visi dan misi yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 20014-2019 adalah sbb:

Visi: **Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua.** Visi tersebut dijabarkan ke dalam tiga Misi yaitu:

(1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) pengurangan pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga, (3) pelayanan kesehatan gratis (4) pelayanan pendidikan gratis, (5) pertukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8) pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “masyarakat sejahtera standar dunia”.

(2) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia

Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) penyelesaian masalah banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8) penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman standar dunia”.

(3) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi

Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: (1) peningkatan pendapatan asli daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, (3) peningkatan pelayanan di kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke rumah, (5) pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7) pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pelayan publik standar dunia bebas korupsi”.

Ada tiga misi dari Pemerintah Kota Makassar yang masing-masing misi memiliki delapan sub misi sehingga total terdapat 24 sub misi.

Menjelang masa akhir RPJMD 2014-2019, perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi tersebut di atas khususnya pada 24 sub misi yang merupakan penjabaran yang lebih operasional dari tiga misi Pemerintah Kota Makassar.

1.2. Perumusan Masalah

Meskipun 24 sub misi yang terdapat pada RPJMD Kota Makassar telah menggunakan bahasa yang lebih operasional tetapi masing-masing misi tersebut masih sulit untuk diukur sehingga perlu dilakukan telaah mengenai indikator kinerja sasarannya masing-masing. Analisis ini semakin mendesak karena masih terdapat informasi yang simpang siur mengenai apa saja sub misi dari pemerintah yang telah berjalan dan belum berjalan optimal. Selain itu, untuk kepentingan penyusunan RPJMD Periode selanjutnya, perlu dilakukan analisis mengenai program apa saja yang masih perlu untuk dilanjutkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penelitian ini mengkaji tiga hal pokok yaitu: penjabaran indikator masing-masing sub misi sehingga lebih mudah untuk diukur, kinerja dari masing-masing sub misi berdasarkan indikator yang telah disimpulkan, dan merekomendasikan program apa saja yang masih perlu untuk dilanjutkan pada RPJMD periode selanjutnya. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan:

1. Apa indikator keberhasilan dari 24 sub misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 yang ditetapkan pada dokumen-dokumen perencanaan Kota Makassar?
2. Bagaimana pencapaian sub misi pada dokumen RPJMD Kota Makassar berdasarkan dokumen laporan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD Kota Makassar?
3. Program apa saja yang masih perlu untuk dilanjutkan pada RPJMD selanjutnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan indikator keberhasilan 24 Sub Misi RPJMD Kota Makassar yang ditetapkan pada dokumen-dokumen perencanaan Kota Makassar
2. Mendeskripsikan pencapaian sub misi pada dokumen RPJMD Kota Makassar berdasarkan dokumen laporan hasil evaluasi RPJMD dan RKPD Kota Makassar.
3. Merekomendasikan program yang masih perlu dilanjutkan pada RPJMD selanjutnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara praktis, adalah memberikan informasi mengenai pencapaian visi dan misi dan sekaligus menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan RPJMD selanjutnya.

1.5. Batasan Penelitian

Sub Misi pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 adalah sebanyak 24 sub misi. Mengingat banyaknya sub misi maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian mengenai sub misi yang tercantum pada RPJMD Kota Makassar berdasarkan studi dokumen resmi pemerintah daerah.

1.6. Indikator Keberhasilan

1.6.1. Keluaran (Output) Penelitian

Output penelitian ini adalah laporan penelitian dan artikel jurnal yang terpublikasi

1.6.2. Dampak (Outcome) Penelitian

Adapun outcome dari penelitian ini adalah:

- b. Kejelasan indikator keberhasilan sub misi RPJMD Kota Makassar
- c. Informasi pencapaian masing-masing sub misi di RPJMD Kota Makassar
- d. Rekomendasi sub misi yang dapat dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Makassar pada RPJMD Selanjutnya

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Kajian Literatur

2.1.1. Tinjauan tentang Visi, Misi dan Strategi

Mulyadi & Setyawan (1999:285) menyatakan bahwa misi adalah jalan pilihan (*the chosen track*) suatu organisasi untuk menyediakan produk dan jasa bagi customer-nya. Perumusan misi adalah suatu usaha untuk menyusun peta perjalanan. Setiap organisasi menjalani kehidupan di dunia yang tidak berpeta. Oleh karena itu, kemampuan organisasi untuk membuat peta yang secara akurat menggambarkan dunia yang dimasuki, memberi kesempatan bagi organisasi untuk menyediakan produk jasa yang memenuhi kebutuhan customers-nya, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi tejamin.

Setelah suatu organisasi menetapkan misi yang merupakan *the chosen track*, selanjutnya organisasi tersebut perlu menetapkan visi organisasi. Mulyadi dkk. (1999:285) menjelaskan bahwa visi adalah suatu pikiran atau gambaran kondisi yang akan kita wujudkan di masa mendatang yang melampaui realitas sekarang, sesuatu yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, suatu keadaan yang akan kita wujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Visi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan.

Dalarn rangka pencapaian visi dan tujuan organisasi, organisasi perlu merumuskan stratgei. Gaspersz (2003) menyatakan bahwa strategi merupakan sekumpulan tindakan terintegrasi yang konsisten dengan visi organisasi yang memungkinkan pencapaian keunggulan hasil yang berkelanjutan. Mulyadi (2001:72)

menjelaskan bahwa strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi. Strategi membentuk pola.

2.1.2. Tinjauan Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan nasional. Alasannya adalah karena potensi pembangunan masing-masing daerah umumnya sangat berbeda, baik dari segi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan potensi pembangunan daerah ini menyebabkan kemampuan daerah untuk bertumbuh dan berkembang menjadi tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Alasan lain yang cukup penting adalah bahwa pada perencanaan pembangunan nasional, peranan pemerintah daerah tidak terlalu menonjol sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan daerah motor utamanya adalah pemerintah daerah sendiri.

Dalam era otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 yang lalu, perencanaan pembangunan daerah semakin diperlukan dan menentukan karena kewenangan pemerintah daerah sudah semakin besar. Namun demikian, perlu diingat bahwa sesuai dengan undang-undang SPPN 2004 perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya dengan perencanaan pembangunan nasional. Karena itu, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus tetap mengacu dan memedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional agar terwujud sinergi dan keterpaduan pembangunan baik antara pusat dan daerah, maupun antar daerah sendiri. Hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, mengenai perencanaan pembangunan daerah, yaitu: "Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional." Adapun pendekatan serta prinsip yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah, telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014 pasal 261 ayat 1, sebagai berikut : "Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Selanjutnya, pasal 262 ayat 1 menjelaskan: "Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Adapun produk akhir (output) dari perencanaan pembangunan daerah berupa dokumen yang dijelaskan pula dalam uu pemerintahan daerah no. 23 Tahun 2014, yang terdiri atas :

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)

2.1.3. Tinjauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus

dapat diselesaikan dan ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini setiap SKPD serta pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyusunan dokumen RPJMD harus sudah dapat diselesaikan dan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah baru dilantik. Dalam praktiknya di lapangan, penyusunan dan penetapan RPJMD selama 3 (Tiga) bulan ini jelas terlalu singkat waktunya sehingga sulit direalisasikan. Terlebih lagi bila RPJMD tersebut akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang ternyata juga cukup memakan waktu dalam pembahasan di DPRD setempat. Karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 masa penyusunan RPJMD tersebut diperpanjang menjadi maksimum 6 (Enam) bulan sesudah kepala daerah resmi dilantik (Syafrizal 2009).

Selain mengenai periode waktu RPJMD, yang juga menjadi bagian penting adalah pola penulisan. Hal yang penting diupayakan dalam hal ini adalah seberapa jauh dokumen perencanaan tersebut bersifat operasional dan bermanfaat untuk mengarahkan para pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga sasaran yang diinginkan dapat terwujud. Adapun Variasi dalam pola penulisan RPJMD dijelaskan oleh Syafrizal (2009) dalam bukunya tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah yaitu: “Secara umum, dewasa ini terdapat dua pola penulisan RPJMD yang berlaku di Indonesia. Pertama, adalah mengikuti pola Bappenas

yang dapat dilihat dari buku RPJM Nasional 2004-2009 dan 2010-2014 yang telah diterbitkan sebelumnya secara resmi. Pola ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa penyusunan RPJMD harus mengacu pada RPJM Nasional. Kedua, adalah mengikuti pola penulisan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk Permendagri 54 Tahun 2010.”

Berdasarkan uraian di atas mengenai pola penyusunan RPJMD, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, aspek yang penting dipertimbangkan dalam menentukan pola penulisan RPJMD mana yang akan digunakan adalah tergantung dari seberapa jauh suatu pola penulisan rencana tersebut secara operasional dapat berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaku para pembangunan. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan seberapa jauh pola penulisan rencana tersebut dapat menjabarkan visi dan misi daerah bersangkutan dan mudah dipahami oleh pelaku pembangunan dan publik.

Adapun unsur dalam daftar isi RPJMD pola Permendagri 54 tahun 2010, adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
4. Analisis isu-isu strategis
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
6. Strategi dan arah kebijakan

7. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah

8. Penetapan indikator kinerja daerah

9. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Berdasarkan unsur yang telah diuraikan di atas, untuk menjelaskan pelaksanaan RPJMD suatu daerah dapat dilihat dari program pembangunan yang dijabarkan dari kebijakan umum, kemudian diuraikan ke dalam kegiatan pembangunan, serta melihat capaiannya berdasarkan indikator kinerja atau indikator sasaran yang telah ditetapkan.

2.2. Jadwal Penelitian

Peta jalan penelitian tergambar pada jadwal berikut:

No.	Tahapan	Target Waktu					
		Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt
1	Persiapan						
2	Pengumpulan Data						
3	Analisis Data: - Analisis data indikator visi misi - Analisis data ketercapaian sub misi - Analisis data rekomendasi keberlanjutan sub misi						
4	Penulisan Laporan						
5	Seminar Akhir						

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai indikator keberhasilan sub misi, pencapaian sub misi serta rekomendasi program yang masih perlu untuk dilanjutkan pada RPJMD selanjutnya.

3.2. Populasi, Sampel dan Lokasi Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh SKPD di Pemerintah Kota Makassar. Adapun sampel dipilih dengan menggunakan metode snowball sampling. SKPD dipilih berdasarkan hasil analisis dokumen RPJMD yang terkait dengan sub misi pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019. Adapun SKPD yang menjadi sampel penelitian ini adalah Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Lokasi penelitian adalah di Kota Makassar.

3.3. Instrumen yang Digunakan

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi dokumen. Dokumen utama yang menjadi rujukan pada penilitian ini adalah dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, RPJP Kota Makassar, Hasil Evaluasi RPJMD serta Renstra SKPD Kota Makassar

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Dalam menguji keabsahan digunakan metode triangulasi data dan triangulasi sumber.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

Hingga Tahun 2015 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

4.2. Indikator Keberhasilan Sub Misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019

Pada bagian ini, masing-masing misi akan dianalisis dengan menggunakan dokumen RPJMD Kota Makassar. Hasil analisis diuraikan sbb:

Misi 1. Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia

(1) Pengurangan Pengangguran

Untuk melacak upaya umum ini, beberapa kata yang digunakan untuk mencari kesepadan makna kata ini dalam dokumen RPJMD adalah pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan kata kunci tersebut, hasil analisis data pada BAB V tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah sbb: upaya pengurangan pengangguran ditemukan dalam tujuan ke tiga yaitu mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, dan lebih spesifik pada sasaran ke delapan dan ke sepuluh. Sasaran kedelapan yaitu: terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Indikator kinerja sasaran ini yaitu angka pengangguran 10,02% pada tahun 2019. Sasaran ke sepuluh yaitu: Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing dengan indikator

kinerja pada tahun 2019 adalah Persentase tenaga kerja/ pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi sebesar 90%.

Penelusuran lebih lanjut pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah ditemukan hasil sbb. Sasaran ke delapan, Terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, diturunkan dalam kebijakan penempatan pencari kerja. Indikator kinerja dari kebijakan ini berbeda dengan indikator kinerja yang diungkapkan pada BAB V. Indikator kinerja yang ditetapkan pada BAB ini adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 124.100 orang pada tahun 2019. Adapun program untuk kebijakan ini adalah program peningkatan kesempatan kerja.

Sasaran ke sepuluh, terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing, diturunkan dalam kebijakan umum berupa peningkatan kompetensi spesifik standar pasar bebas ASEAN. Indikator kinerja dari kebijakan umum ini juga berbeda dengan indikator kinerja sasaran yang diuraikan pada BAB V. Indikator kinerja yang ditetapkan pada bab ini adalah jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN sebanyak 56.000 pada tahun 2019. Perubahan yang diidentifikasi pada indikator kinerja di bab ini adalah tidak adanya kata pencari kerja sehingga menimbulkan kesan bahwa upaya peningkatan kompetensi hanya dilakukan pada tenaga kerja saja dan tidak termasuk pencari kerja. Untuk itu, indikator ini tidak relevan lagi dengan sub misi pengurangan pengangguran. Hal ini dipertegas dengan Program yang direncanakan untuk kegiatan ini yaitu program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 1 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
Mewujudkan peningkatan	Terpenuhinya kebutuhan	Angka pengangguran	Penempatan pencari kerja	Program Peningkatan

pendapatan masyarakat	lapangan kerja dan kesempatan berusaha	10,02% pada tahun 2019		Kesempatan Kerja
	Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing	Percentase tenaga kerja/ pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi sebesar 90% pada tahun 2019	Peningkatan kompetensi spesifik standar pasar bebas ASEAN	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pada bab ke VIII tentang Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan pendanaan, penelusuran dilakukan terhadap program peningkatan kesempatan kerja dan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta tetap melakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci pencari kerja dan tenaga kerja. Hasil penelusuran diuraikan sbb: pada program peningkatan kesempatan kerja ditemukan indikator kinerja program pada tahun 2019 adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 29.280 orang. Data ini berbeda dengan indikator kinerja kebijakan yang menjadi dasar program tersebut sebagaimana diuraikan pada Bab VII. Untuk program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, hasil penelusuran menunjukkan indikator kinerja program adalah jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN sebanyak 90% pada tahun 2019. Data ini juga berbeda dengan indikator kinerja kebijakan pada BAB VII, tetapi angka 90% tersebut sama dengan indikator kinerja sasaran pada BAB V.

Berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kata kunci tenaga kerja, ditemukan tambahan satu program yang terkait tenaga kerja yaitu program pengembangan sistem informasi pasar kerja dan produktivitas ketenagakerjaan. Indikator kinerja dari program ini adalah persentase tenaga kerja produktif yang tersertifikasi level ASEAN sebanyak

56.000 orang secara kumulatif dari tahun 2014. Angka ini membingungkan mengingat indikator menyatakan persentase sedangkan data angka menunjukkan akumulasi orang. Selain itu, angka 56.000 orang pada indikator kinerja program pada tahun 2019 identik dengan indikator kinerja program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang tercantum pada bab VII. Perbandingan indikator kinerja pada dokumen RPJMD Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran BAB V	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
angka pengangguran 10,02% pada tahun 2019	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	14.545 orang	124.100 orang	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	29.280 orang
Persentase tenaga kerja/ pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi sebesar 90% pada tahun 2019	Jumlah tenaga kerja yang berkompotensi spesifik level ASEAN	4.877 orang	56.000 orang	Jumlah tenaga kerja yang berkompotensi spesifik level ASEAN	90%
				Persentase tenaga kerja produktif yang tersertifikasi level ASEAN	56.000 orang (kumulatif)

Data tersebut di atas menunjukkan adanya indikator yang tidak konsisten dari program-program tentang ketenagakerjaan. Khusus untuk program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pada bab VII dan VIII tidak lagi ditemukan kata pencari kerja atau kata lain yang menjelaskan bahwa program tersebut terkait dengan pengurangan pengangguran sehingga indikator ini tidak lagi relevan digunakan sebagai indikator sub misi pengurangan pengangguran.

Satu-satunya indikator yang tersisa untuk mengukur keberhasilan sub misi pengurangan pengangguran adalah indikator turunan dari sasaran terpenuhinya kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Ada tiga indikator yang berbeda dari sasaran ini pada tahun 2019 yaitu angka pengangguran 10,24% pada BAB V, jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 124.100 orang pada BAB VII, dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 29.280 orang. Perbedaan angka pada masing-masing dapat berakibat pada kesulitan dalam mengukur keberhasilan dari pencapaian sub misi ini. Perbedaan angka ini bukan satu-satunya hal yang tidak jelas dari indikator ini. Penggunaan kata “pencari kerja yang ditempatkan” juga merupakan indikator yang dapat menimbulkan banyak pemahaman. Kata ditempatkan dapat diterjemahkan sebagai mendapat pekerjaan, sekedar dimagangkan pada tempat kerja tertentu, atau penafsiran lain yang bisa saja muncul belakangan.

Kejelasan indikator ditemukan pada dokumen Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Indikator kinerja pencari kerja yang ditempatkan dijelaskan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Indikator ini didasarkan pada perbandingan antara pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan pencari kerja terdaftar.

(2) Pemberian Jaminan Sosial Keluarga

Untuk melacak upaya umum ini, kata kunci yang digunakan adalah jaminan sosial. Berdasarkan kata kunci tersebut, hasil analisis data pada BAB V menunjukkan upaya pemberian jaminan sosial ditemukan dalam tujuan ke tiga yaitu mewujudkan

peningkatan pendapatan masyarakat, dan lebih spesifik pada sasaran ke sembilan yaitu: terwujudnya jaminan sosial keluarga serba guna. Indikator kinerja sasaran ini yaitu cakupan jaminan sosial keluarga serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas sebesar 50% pada tahun 2019.

Tabel 3 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat	Terwujudnya jaminan sosial keluarga serba guna	Cakupan jaminan sosial keluarga serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas 50% pada tahun 2019	Pengembangan Jaminan Sosial serbaguna	Program Jaminan Sosial serba Guna Keluarga Miskin

Penelusuran lebih lanjut pada Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah ditemukan hasil sbb. Sasaran ke sembilan, terwujudnya jaminan sosial keluarga serba guna, diturunkan dalam kebijakan pengembangan jaminan sosial serbaguna. Indikator kinerja dari kebijakan ini berbeda dengan indikator kinerja yang diungkapkan pada BAB V. Indikator kinerja yang ditetapkan pada BAB ini adalah cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas sebesar 10% pada tahun 2019. Adapun program untuk kebijakan ini adalah program jaminan sosial serba guna keluarga miskin. Pada BAB VIII, indikator kinerja program untuk sub misi ini adalah cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas sebesar 50% pada tahun 2019. Indikator ini sama dengan indikator kinerja sasaran yang dijelaskan pada BAB V. Dengan demikian, angka 50% tampaknya lebih tepat dijadikan alat ukur keberhasilan sub misi pemberian jaminan sosial keluarga. Perbandingan antara masing-masing indikator di setiap BAB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
Cakupan jaminan sosial keluarga serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas 50% pada tahun 2019	Cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas	0%	10%	Cakupan Jaminan Sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas	50%

(3) Pelayanan Kesehatan Gratis

Kata kunci yang digunakan pada upaya ini adalah kesehatan gratis. Berdasarkan kata kunci tersebut, Pada BAB V tidak ditemukan adanya tujuan, sasaran ataupun indikator yang menyebutkan kesehatan gratis. Sebetulnya pelayanan kesehatan tercantum dalam tujuan kedua yaitu mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan ini diturunkan menjadi empat sasaran yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik, berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, serta terwujudnya pola hidup sehat masyarakat. Secara sepintas, tujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kelihatannya berkaitan dengan pelayanan kesehatan gratis. Tetapi asumsi itu terbantahkan dengan indikator dari sasaran ini bukannya mengenai kesehatan gratis tetapi usia harapan hidup.

Tabel 5 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Mewujudkan peningkatan	Terwujudnya pelayanan	Usia Harapan	Peningkatan kualitas dan	Peningkatan keterjangkauan	Program Upaya

derajat kesehatan masyarakat	kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Hidup pada tahun 2019	72 jangkauan pelayanan kesehatan (modernisasi posyandu, gratis pelayanan puskesmas/ pustu, gratis pelayanan RS, penanganan 1.000 hari pertama kehidupan)	masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar	Kesehatan Masyarakat
				Peningkatan kualitas pelayanan RS	Program Upaya Kesehatan perorangan

Pada BAB VIII, kata kunci kesehatan gratis ditemukan pada strategi pencapaian sasaran keempat yaitu peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan (modernisasi posyandu, gratis pelayanan puskesmas/ pustu, gratis pelayanan RS, penanganan 1.000 hari pertama kehidupan). Kesehatan gratis pada strategi ini spesifik pada pelayanan puskesmas/pustu dan pelayanan rumah sakit gratis. Strategi ini diturunkan menjadi kebijakan peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Indikator kinerja untuk kebijakan peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar yaitu persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar adalah 100% pada tahun 2019. Untuk kebijakan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, indikator kinerjanya adalah jumlah pasien rujukan yang terlayani adalah 90% pada tahun 2019. Masing-masing indikator tersebut sama yang terdapat pada BAB VII dan BAB VIII. Perbandingan antara indikator kinerja sasaran pada masing-masing bab dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII		BAB VIII		
BAB V	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	50%	100%	Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	100%
	Jumlah pasien rujukan yang terlayani	60% (80.225 org)	90% (109.208 org)	Jumlah Pasien rujukan yang terlayani	90%

Indikator kinerja pada BAB VII dan BAB VIII tidak menuliskan secara dengan jelas kata kunci pelayanan kesehatan gratis. Oleh karena itu, ketercapaian 100% pelayanan kesehatan dasar ataupun 90% pasien rujukan yang terlayani belum dapat dipastikan memenuhi indikator pelayanan kesehatan gratis jika merujuk pada dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019.

(4) Pelayanan Pendidikan Gratis

Pelayanan pendidikan gratis ditelusuri dengan menggunakan kata kunci pendidikan gratis. Hasil penelusuran pada BAB V menunjukkan tidak adanya tujuan, sasaran dan indikator yang menyebutkan pendidikan gratis. Kata kunci pendidikan ditemukan pada tujuan pertama yaitu: mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Tujuan ini terdiri dari tiga sasaran yaitu terwujudnya pemerataan akses layanan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, serta meningkatnya kemampuan literasi masyarakat. Indikator yang

digunakan masing-masing: angka rata-rata lama sekolah, persentase kelulusan ujian dan angka melek huruf.

Tabel 7 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Deposito pendidikan gratis SD dan SMP	Pengembangan deposito pendidikan

Kata pendidikan gratis ditemukan pada BAB VII dan BAB VIII yaitu pada kebijakan deposito pendidikan gratis SD dan SMP. Kebijakan ini secara operasional dilaksanakan dalam program pengembangan deposito pendidikan. Indikator kinerja dari kebijakan ini adalah 10% dari jumlah murid SD/SMP mendapatkan deposito pendidikan pada tahun 2019.

Tabel 8 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
Tidak ada	Persentase peserta didik yang mendapatkan deposito pendidikan	0	10% dari jumlah murid SD/ SMP	Persentase peserta didik yang mendapatkan deposito pendidikan	10%

(5) Penukaran Sampah dengan Beras

Kata kunci yang digunakan untuk menelusuri sub misi ini adalah sampah dan beras. Pada BAB V, kata kunci ini ditemukan pada tujuan ketujuh yaitu mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota. Lebih spesifik, upaya ini terdapat

pada sasaran ke-31 yaitu: meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan dengan indikator kinerja sasaran: volume dan persentase sampah yang ditangani pada tahun 2019 sebesar 192 Ton Sampah ditukar dengan beras, serta 95% sampah yang diangkut dan direduksi.

Tabel 9 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota	meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan	volume dan persentase sampah yang ditangani pada tahun 2019 sebesar 192 Ton Sampah ditukar dengan beras, serta 95% sampah yang diangkut dan direduksi	Gerakan sampah tukar beras	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan

Penelusuran lebih lanjut pada BAB VI dan BAB VII menunjukkan hasil sbb. Pada BAB VI, kata kunci sampah dan beras diturunkan menjadi kebijakan gerakan sampah ditukar beras. Indikator kinerja sasaran yang digunakan yaitu sampah ditukar beras sebanyak 2.497 ton sampah pada tahun 2019. Indikator ini juga ditemukan pada BAB VIII dengan target angka yang identik pada BAB VII. Kebijakan ini dilakukan melalui program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan.

Tabel 10 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
volume dan persentase sampah yang ditangani pada tahun 2017 sebesar 192 Ton	Sampah Tukar Beras	657 ton	2.497 Ton Sampah	Sampah tukar beras	2.497 Ton Sampah

Sampah ditukar dengan beras, serta 95% sampah yang diangkut dan direduksi					
---	--	--	--	--	--

(6) Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Dana Bergulir

Kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi misi ini adalah: pelatihan, keterampilan, peningkatan kompetensi, dana bergulir, dan bantuan keuangan. Hasil identifikasi dengan menggunakan kata kunci tersebut pada BAB V menunjukkan adanya satu tujuan yang bersesuaian dengan misi tsb yaitu pada tujuan ketiga sasaran ke sepuluh. Tujuan ketiga yaitu mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat. Sasaran ke sepuluh yaitu terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Indikator kinerja sasarannya yaitu persentase tenaga kerja/pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi pada tahun 2019 sebesar 90%.

Tabel 11 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
Mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing	Persentase tenaga kerja/ pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi sebesar 90% pada tahun 2019	Peningkatan kompetensi spesifik standar pasar bebas ASEAN	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Berkembangnya K-UMKM dan ekonomi kreatif	Nilai omzet Koperasi 1.246 juta, UKM 355 juta dan Transaksi Ekonomi Kreatif 1.467 M pada tahun 2019	Peningkatan modal usaha bagi UMKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sasaran terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing diturunkan menjadi kebijakan peningkatan kompetensi spesifik standar pasar bebas ASEAN dan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Untuk indikator kinerja pada BAB VII yaitu jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN sebanyak 56.000 orang pada tahun 2019. Pada BAB VIII, terdapat dua indikator kinerja program yaitu jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN sebesar 90% pada tahun 2019 dan persentase tenaga kerja produktif yang tersertifikasi level ASEAN sebanyak 56.000 orang.

Untuk pemberian dana bergulir, tidak ditemukan pada BAB V. Indikasi pemberian dana bergulir ditemukan pada BAB VII yaitu pada kebijakan peningkatan modal usaha bagi UMKM dan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. Indikator kinerja dari kebijakan ini sebagaimana tercantum dalam BAB VII adalah jumlah koperasi dan UMKM yang bisa mengakses lembaga keuangan sebesar 25% pada tahun 2019. Indikator ini berbeda dengan indikator kinerja program yang terdapat pada BAB VIII yaitu jumlah koperasi dan UMKM yang bisa mengakses lembaga keuangan sebanyak 500 Koperasi dan UMKM pada tahun 2019.

Tabel 12 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
Persentase tenaga kerja/ pencari kerja yang mendapatkan peningkatan kompetensi sebesar 90% pada tahun 2019	Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN	4.877 orang	56.000 orang	Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN	90%
				Persentase tenaga kerja produktif	56.000 orang

				yang tersertifikasi level ASEAN	(kumulatif)
Nilai omzet Koperasi 1.246 juta, UKM 355 juta dan Transaksi Ekonomi Kreatif 1.467 M pada tahun 2019	Jumlah Koperasi dan UMKM yang bisa mengakses lembaga Keuangan	25%	25%	Jumlah Koperasi dan UMKM yang bisa mengakses lembaga Keuangan	500 Koperasi dan UMKM

(7) Pembangunan Rumah Murah

Dua kata kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi misi ini adalah rumah dan rumah murah. Untuk kata kunci rumah pada BAB V ditemukan pada tujuan kedelapan yaitu mewujudkan pemukiman sehat bagi masyarakat. Pada sasaran ke 34 tertulis: meningkatnya kualitas dan kelayakan huni perumahan masyarakat. Indikatornya: persentase rumah layak huni (rumah beton/*knock-down* layak huni) pada tahun 2017 adalah 5 unit rumah. Untuk kata kunci rumah murah, tidak ditemukan tujuan, sasaran maupun indikator yang menjelaskan tentang rumah murah.

Tabel 13 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
Mewujudkan pemukiman sehat bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kelayakan huni perumahan masyarakat	Persentase rumah layak huni (rumah beton/ <i>knock-down</i> layak huni sebanyak 15 unit pada tahun 2019	Pembangunan rumah model <i>knock-down</i> (beton) bagi korban kebakaran bencana lainnya	Program Rumah Beton Bersubsidi

Penelusuran pada BAB VII menunjukkan adanya rencana program rumah beton bersubsidi yang dapat diasumsikan sebagai rumah murah. Program ini merupakan turunan dari kebijakan pembangunan rumah model *knock-down* (beton) bagi korban

kebakaran dan bencana lainnya. Indikator kinerja untuk sasaran ini pada BAB VII adalah jumlah dan % korban kebakaran dan bencana lainnya yang mendapatkan bantuan rumah model knock down pada tahun 2019 adalah 256 unit (90%) dan 100 unit rumah. Pada BAB VIII, indikator yang tertulis hanya 20 unit pada tahun 2015 dan 20 unit pada tahun 2016. Tidak ditemukan data target jumlah rumah pada tahun 2019.

Tabel 14 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB V	BAB VII		BAB VIII	
		Indikator	2014	2019	Indikator
Persentase rumah layak huni (rumah beton/knoct-down layak huni sebanyak 15 unit pada tahun 2019)	Jumlah dan % korban kebakaran dan bencana lainnya yang mendapatkan bantuan rumah model knock down	223 unit (65%)	256 unit (90%)	100 Unit	Jumlah dan % korban kebakaran dan bencana lainnya yang mendapatkan bantuan rumah model knock down 20 unit

(8) Pengembangan Kebun Kota

Pengembangan kebun kota disebutkan secara eksplisit pada BAB V di tujuan ketiga yaitu mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat. Pada sasaran ke-13 disebutkan meningkatnya usaha pertanian yang mempunyai nilai tambah tinggi dan peluang pasar dengan indikator volume dan nilai produksi vertikal garden/kebun kota di lorong sebesar 3.296 ton (55,79 Miliar) dan Cabe sebanyak 224 ton (5,6 Miliar).

Tabel 15 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
mewujudkan peningkatan	meningkatnya usaha pertanian	volume dan nilai produksi vertikal	Pengembangan ekonomi	Program Pengembangan

pendapatan masyarakat	yang mempunyai nilai tambah tinggi dan peluang besar	garden/kebun kota di lorong sebesar 3.450 ton (59,19 Miliar) dan Cabe sebanyak 308 ton (7,7 Miliar)	lorong dengan teknologi vertikal garden	Pertanian Vertical Garden
-----------------------	--	---	---	---------------------------

Sasaran pada BAB V dijelaskan lebih lanjut pada BAB VII dalam kebijakan pengembangan ekonomi lorong dengan teknologi vertikal garden dan program pengembangan pertanian vertical garden. Indikator kinerja pada BAB VII adalah jumlah lorong yang memiliki vertical gardern sebanyak 1.250 lorong pada tahun 2019. Jumlah tersebut berbeda dengan indikator kinerja program yang dijelaskan pada BAB VIII yaitu sebanyak 800 lorong pada tahun 2019.

Tabel 16 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
volume dan nilai produksi vertikal garden/kebun kota di lorong sebesar 3.450 ton (59,19 Miliar) dan Cabe sebanyak 308 ton (7,7 Miliar)	Jumlah lorong yang memiliki vertical garden	0	1.250 lorong	Jumlah lorong yang memiliki vertical garden	800 lorong

Misi 2. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia

(9) Penyelesaian Masalah Banjir

Pada BAB V, penyelesaian masalah banjir ditemukan pada tujuan keenam yaitu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas dan kualitas yang setara dengan standar dunia. Sasaran ke-26 yaitu meningkatnya keterpenuhan dan

kualitas sistem drainase dan penanganan banjir dengan indikator rata-rata jumlah, tinggi dan lama titik genangan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebanyak 16 titik genangan.

Tabel 17 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas dan kualitas yang setara dengan standar dunia	meningkatnya keterpenuhan dan kualitas sistem drainase dan penanganan banjir	rata-rata jumlah, tinggi dan lama titik genangan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebanyak 16 titik genangan	Penanganan terpadu titik genangan	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pada BAB VII, penyelesaian masalah banjir ditemukan pada kebijakan penanganan terpadu titik genangan dan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

Indikator kinerja sasaran pada BAB VII adalah jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangannya adalah sebanyak 29 titik genangan pada tahun 2019.

Indikator ini berbeda dengan indikator kinerja program pada BAB VIII yaitu jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangannya sebanyak 10 titik.

Perbandingan indikator pada masing-masing bab dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
BAB V	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
	rata-rata jumlah, tinggi dan lama titik genangan yang terjadi pada	Jumlah titik genangan yang dikurangi	34 Titik Genangan	29 Titik Genangan	Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama

tahun 2019 adalah sebanyak 16 titik genangan	tinggi, luas dan lama genangannya			genangan	
--	-----------------------------------	--	--	----------	--

(10) Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan Kota

Sub misi ini ditelusuri dengan menggunakan kata kunci pembentukan badan dan pengendali pembangunan kota. Hasil penelitian menunjukkan kata ini hanya muncul di sub misi saja dan tidak ditemukan pada BAB V, BAB VII dan BAB VIII RPJMD Kota Makassar 2014-2019.

(11) Pembangunan *Waterfront City*

Pembangunan waterfront city ini tertulis secara eksplisit pada BAB V dalam tujuan ketujuh yaitu mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota. Pada sasaran ke-33 tertulis: terwujudnya water-front city dan tata kelola pesisir/pulau-pulau. Indikator dari sasaran ini adalah luas waterfront city yang terkelola (jumlah pengaman pantai) pada Tahun 2019 adalah 350 meter. Indikator kinerja dari tahun 2015-2017 tidak tercantum. Artinya program ini direncanakan dimulai pada tahun 2018.

Tabel 19 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota	terwujudnya water-front city dan tata kelola pesisir/pulau-pulau	luas waterfront city yang terkelola (jumlah pengaman pantai) pada Tahun 2019 adalah 350 meter	Penataan fungsi water-front city	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Program Pencegahan dan kesiap

				siagaan bencana
--	--	--	--	-----------------

Pada BAB VII, pembangunan *water-front city* ditemukan pada kebijakan penataan fungsi *water front city*. Kebijakan ini dilaksanakan dalam dua program yaitu program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut, serta program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Untuk program peningkatan mitigasi bencana, indikator kinerja yang digunakan pada bab VII adalah jumlah satuan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi *water-front city* yang berkembang adalah sebanyak 22.520 pohon mangrove dan 30.000 m² padang lamun. Indikator ini berbeda dengan indikator kinerja program pada BAB VIII yaitu sosial ekonomi sebanyak 820 orang dan 2.500 pohon. Untuk program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, indikator kinerja pada Bab VII adalah jumlah pengaman pantai sepanjang 800 meter pada tahun 2019. Indikator ini sama dengan indikator kinerja program pada BAB VIII.

Tabel 20 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program		
	BAB VII		BAB VIII		Indikator	2019
	Indikator	2014	Indikator	2019		
luas waterfront city yang terkelola (jumlah pengaman pantai) pada Tahun 2019 adalah 350 meter	Jumlah satuan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi <i>water-front city</i> yang berkembang	10.020 pohon mangrove dan 0 m ² padang Lamun	22.520 pohon mangrove dan 30.000 m ² padang lamun	Jumlah satuan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi <i>water-front city</i> yang berkembang	sosek : 820 org, 2500 pohon	800 meter
	Jumlah Pengaman Pantai	100 m	800 m	Panjang pengaman pantai yang dibangun		

(12) Penataan Transportasi Publik

Penataan transportasi publik terdapat pada BAB V dalam tujuan keenam yaitu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas dan kualitas yang setara dengan standar dunia. Penataan transportasi dapat ditemukan pada sasaran ke-25 yaitu berkembangnya transportasi publik dengan pemenuhan infrastruktur perhubungan lainnya. Indikatornya adalah persentase penumpang yang menggunakan transportasi publik “standar dunia” pada tahun 2019 adalah sebanyak 40%.

Tabel 21 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas dan kualitas yang setara dengan standar dunia	berkembangnya transportasi publik dengan pemenuhan infrastruktur perhubungan lainnya	persentase penumpang yang menggunakan transportasi publik “standar dunia” pada tahun 2019 adalah sebanyak 40%	Peningkatan kualitas moda transportasi publik	Program Pengembangan dan Pengelolaan Lalu Lintas

Pada BAB VII, penataan transportasi publik ditemukan pada kebijakan peningkatan kualitas moda transportasi publik dan program pengembangan dan pengelolaan lalu lintas. Indikator kinerja pada BAB VII adalah persentase prasarana perhubungan darat yang mendukung moda transportasi publik sebesar 85% pada tahun 2019. Indikator ini sama dengan indikator kinerja program pada BAB VIII.

Tabel 22 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
BAB V	Indikator	2014	2019	Indikator	2019

persentase penumpang yang menggunakan transportasi publik “standar dunia” pada tahun 2017 adalah sebanyak 40%	Percentase Prasarana Perhubungan Darat yang mendukung moda transportasi publik	54%	85%	Percentase Prasarana Perhubungan Darat yang mendukung moda transportasi publik	85%
---	--	-----	-----	--	-----

(13) Pengembangan Infrastruktur Kota

Dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Makassar 2014-2019, kata infrastruktur hanya ditemukan pada tujuan enam sasaran ke-25 sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Kata infrastruktur hanya menjelaskan tentang infrastruktur perhubungan saja. Untuk itu, penelusuran tidak bisa hanya mengandalkan kata infrastruktur secara tersirat melainkan juga perlu dicari kata yang sepadan. Hasil penelusuran pada BAB V menunjukkan jika pengembangan infrastruktur kota juga bisa ditemukan pada tujuan keenam sasaran ke-27 yang berbunyi meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah. Indikatornya, porsi panjang jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 70%. Selain itu, pada sasaran ke 28 juga disebutkan meningkatnya sistem dan jaringan utilitas kota dengan indikator Cakupan panjang jaringan utilitas (listrik, telpon, air minum) yang terintegrasi dalam boxculvert pada tahun 2019 adalah 15 km.

Tabel 23 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana	meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas	porsi panjang jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik pada tahun 2019	Pembangunan jalan dan jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

dasar dengan kapasitas dan kualitas yang setara dengan standar dunia	antar wilayah meningkatnya sistem dan jaringan utilitas kota	adalah 70%	Cakupan panjang jaringan utilitas (listrik, telpon, air minum) yang terintegrasi dalam boxculvert pada tahun 2019 adalah sebanyak 15 km	Pengembangan boxculvert sebagai sarana integrasi utilitas kota	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
--	--	------------	---	--	---

Pada BAB VII, sasaran peningkatan kapasitas jalan dan jembatan bagi aksesibilitas antar wilayah diupayakan melalui kebijakan pembangunan jalan dan jembatan diturunkan menjadi program pembangunan jalan dan jembatan. Indikator kinerja sasaran ini pada BAB VII adalah porsi panjang jalan dan jembatan yang dibangun adalah 7,8 km jalan dan 13 unit jembatan. Jumlah ini sedikit berbeda dengan indikator kinerja program pada BAB VIII yaitu 7,8 km jalan dan 8 unit jembatan.

Untuk sasaran meningkatnya sistem dan jaringan utilitas kota diupayakan melalui kebijakan pengembangan boxculvert sebagai sarana integrasi utilitas kota dan diturunkan melalui program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong. Indikator kinerja sasaran pada BAB VII adalah jumlah panjang dan persentase box culvert yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana integrasi utilitas sepanjang 75 km pada tahun 2019. Pada indikator kinerja program di BAB VIII tertulis indikator 15 km yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana integrasi utilitas pada tahun 2016 pada tahun 2016. Indikator kinerja program untuk sasaran ini hanya tertulis sampai tahun 2016 pada BAB VIII.

Tabel 24 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
porsi panjang jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 70%	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun	Jalan = 0 Km, Jembatan 3 Unit	Jalan = 7,8 Km, Jembatan 13 Unit	Jumlah panjang jalan dan jembatan yang dibangun	7,8 km jalan dan 8 unit jembatan
Cakupan panjang jaringan utilitas (listrik, telpom, air minum) yang terintegrasi dalam boxculvert pada tahun 2019 adalah sebanyak 15 km	Jumlah panjang dan persentase box culvert yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana integrasi utilitas	0 km	75 km box culvert yg terpasang dan berfungsi sebagai sarana integrasi utilitas	Jumlah panjang dan % box culvert yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana integrasi utilitas	15 Km box culvert yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana intagrasi utilitas pada tahun 2016

(14) Pengembangan Pinggiran Kota

Penggunaan kata pinggiran hanya ditemukan pada tujuan ke enam sasaran ke-29. Hanya saja pinggiran yang dijelaskan adalah pinggiran kanal dan bukannya pinggiran kota. Jika dicermati pada peta Kota Makassar, kebanyakan kanal tidak berada di pinggiran kota melainkan ada pada pusat kota sehingga pinggiran kanal tidak dapat mewakili pinggiran kota.

(15) Pengembangan Taman Tematik

Kata taman tematik ditemukan pada BAB V dalam indikator kinerja sasaran ke-30 dari tujuan ke tujuh. Tujuan ketujuh adalah mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota. Sasaran ke-30 berbunyi: meningkatkan luas ruang terbuka hijau publik dan privat. Indikatornya: persentase luas dan sebaran RTH publik, privat dan taman tematik pada tahun 2017 adalah sebesar 13,51% luar RTH dan 5 taman tematik.

Tabel 25 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup kota	meningkatkan luas ruang terbuka hijau publik dan privat	persentase luas dan sebaran RTH publik, privat dan taman tematik pada tahun 2019 adalah sebesar 18,71% luar RTH dan 8 taman tematik	Pengembangan taman tematik	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada BAB VII, kata kunci taman tematik ditemukan pada kebijakan pengembangan taman tematik dan diturunkan menjadi program pengelolaan ruang terbuka hijau. Indikator kinerja untuk sasaran ini adalah jumlah dan luas taman tematik yang

dikembangkan sebanyak 8 taman pada tahun 2019. Indikator kinerja ini sama dengan indikator kinerja program yang dijelaskan pada BAB VIII.

Tabel 26 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
persentase luas dan sebaran RTH publik, privat dan taman tematik pada tahun 2019 adalah sebesar 18,71% luar RTH dan 8 taman tematik	Jumlah dan luas taman tematik yang dikembangkan	0 taman	8 taman	Jumlah dan luas taman tematik yang dikembangkan	8 taman

(16) Penataan Lorong

Kata hanya lorong ditemukan pada tujuan ketiga sasaran ke 13. Tujuan dan sasaran tersebut telah dibahas pada bagian sebelumnya tentang kebun kota yang tujuannya akhirnya adalah peningkatan pendapatan. Lorong pada sasaran ini hanya diposisikan sebagai tempat kebun kota. Tidak ada penjelasan spesifik tentang penataan lorong itu sendiri.

Misi 3. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi

(17) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kata pendapatan asli daerah pada BAB V ditemukan pada tujuan ke 12 sasaran ke-50. Tujuan ke-12 berbunyi meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sasaran ke-50 berbunyi: berkembangnya sumber-sumber pendapatan daerah.

Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 adalah 9%.

Tabel 27 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
meningkatkan kapasitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah	berkembangnya sumber-sumber pendapatan daerah	pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 adalah 9%	Intensifikasi pemanfaatan sumber pendapatan berbasis online	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pada BAB VII, sasaran berkembangnya sumber-sumber pendapatan daerah ditemukan pada kebijakan intensifikasi pemanfaatan sumber pendapatan berbasis online serta program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Ada dua indikator kinerja yang ditemukan pada BAB VII yaitu jumlah sumber pajak yang efektif dimanfaatkan (*tax based policy*) adalah sebanyak 11 pajak dan 2 retribusi daerah pada tahun 2019 serta persentase pencapaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah masing-masing 100% pada tahun 2019. Indikator kinerja yang belum dapat dikonfirmasi sama dengan indikator kinerja yang dijelaskan pada BAB VIII karena di indikator kinerja program pada BAB VIII hanya tertulis sampai tahun 2017 yaitu jumlah sumber pajak yang efektif dimanfaatkan sebanyak 2 pajak dan 1 retribusi daerah. Tidak ditemukan data lebih lanjut setelah tahun 2017 mengenai berapa pajak yang efektif dimanfaatkan. Demikian pula pada kolom capaian akhir kinerja RPJMD tidak ditemukan data apapun (kolom tidak terisi). Untuk indikator kinerja kedua tidak ditemukan perbedaan antara indikator kinerja pada BAB VII dan Indikator kinerja sasaran pada BAB VIII.

Tabel 28 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 adalah 9%	Jumlah sumber pajak yang efektif dimanfaatkan (<i>tax-based policy</i>)	1 Jenis Pajak (Pajak Penerangan Jalan)	11 Pajak dan 2 Restribusi Daerah	Jumlah sumber pajak yang efektif dimanfaatkan (<i>tax-based policy</i>)	2 Pajak dan 1 Restribusi Daerah (tahun 2017)
	Persentase capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Realisasi pajak daerah (72,09%) retribusi daerah (92,19%)	Realisasi pajak daerah (100%) retribusi daerah (100%)	Persentase capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah	Realisasi pajak daerah (100%) retribusi daerah (100%)

(18) Peningkatan Etos dan Kinerja Aparat RT/RW

Upaya umum ini mempunyai kata kunci yang sangat spesifik yaitu RT/RW. Dalam BAB V khususnya pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran, tidak ditemukan kata RT/WR. Kata kunci RT/RW muncul pada BAB VII dalam strategi pencapaian sasaran ke-40 yang berbunyi: peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan kelurahan serta RT/RW. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan yaitu persentase kecamatan dan kelurahan yang meningkat kinerja pelayanannya pada tahun 2017 adalah 100% (15 dari 15 kecamatan meraih ISO). Terdapat inkonsistensi pada indikator kinerja sasaran dengan strategi yang dipilih untuk pencapaian sasaran. Sub misi ini spesifik menekankan pada peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW sementara indikator yang tersedia di semua BAB hanya menjadikan kecamatan sebagai sasaran kebijakan/progam. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa peningkatan etos dan kinerja

aparat RT/WR tidak memiliki indikator kinerja pada RPMD Kota Makassar Tahun 2014-2019.

(19) Peningkatan Pelayanan di Kelurahan

Ada dua kata kunci dalam sub misi ini yaitu pelayanan dan kelurahan. Kata pelayanan ditemukan pada tujuan ke-11 yaitu peningkatan kinerja pelayanan publik. Pada sasaran ke-44 tertulis: terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Adapun indikator kinerja sasaran yang ditetapkan adalah indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2017 adalah sebesar 90%. Sayangnya indikator ini berlaku secara umum dan tidak menyebut secara spesifik tentang kelurahan. Kata kelurahan ditemukan pada tujuan ke 10 sasaran ke 40 sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya. Sasaran tersebut fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. Pada indikator kinerja sasaran, kelurahan disebutkan sebagai sasaran peningkatan kapasitas, tetapi jika diperhatikan milestone pencapaian sasaran, tampaknya yang diukur hanya pencapaian pada pemerintah kecamatan saja.

(20) Pelayanan Publik Langsung ke Rumah

Sub misi ini tidak ditemukan pada semua tujuan, sasaran maupun indikator kinerja sasaran pemerintah. Pelayanan publik langsung ke rumah ditemukan pada ditemukan pada BAB VII yaitu pada strategi sasaran ke 44 yang berbunyi: Penguatan pelayanan STSP dan penghantaran layanan ke rumah. Strategi ini diturunkan menjadi dua kebijakan yaitu pertama, peningkatan efektivitas dan transparansi PTSP dengan indikator keberhasilan berupa tingkat kepuasan masyarakat atas layanan PTSP sebesar

95% pada tahun 2019. Kedua, penerapan dan implementasi *citizen charter* dan perjanjian kinerja SKPD dengan indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu persentase capaian kinerja yang termuat dalam *citizen charter* dan Persentase Capaian Kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah masing-masing sebesar 100%. Uraian tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara Strategi dengan indikator kinerja sasaran. Strategi pengantaran layanan ke rumah tidak diturunkan menjadi indikator yang sesuai seperti cakupan pelayanan atau jumlah masyarakat yang dilayani dengan pengantaran layanan ke rumah. Indikator yang ada juga tidak dapat menjadi jaminan pelayanan ke rumah warga dilaksanakan. Pencapaian kepuasan masyarakat hingga 95 % maupun implementasi *citizen charter* 100% tidak selamanya diperoleh melalui pelayanan sampai ke rumah.

Pelayanan langsung ke rumah ditemukan di BAB VII yaitu indikator kinerja dari sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Indikator yang dimaksud yaitu persentase 100% layanan kesehatan langsung ke rumah 24 jam (*home care*) pada tahun 2019. Capaian ini merupakan bagian dari program pelayanan kesehatan penduduk miskin kota. Program dan indikator yang sama juga ditemukan pada BAB VIII tentang indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan.

(21) Pengembangan Pelayanan Publik Terpadu di Kecamatan

Kata kunci yang digunakan untuk menelusuri sub misi ini yaitu kecamatan dan pelayanan publik. Hasil penelusuran pada BAB V dengan menggunakan kata kunci kecamatan menunjukkan bahwa kata kecamatan tidak ditemukan pada semua tujuan dan sasaran tetapi ditemukan pada indikator kinerja sasaran ke 40 yang berbunyi persentase

kecamatan dan kelurahan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 14 dari 15 kecamatan pada tahun 2019. Penekanan indikator ini pada pengembangan kapasitas kecamatan tetapi tidak terjelaskan dengan detail mengenai pengembangan kapasitas seperti apa yang dimaksud sehingga belum meyakinkan untuk menjelaskan mengenai pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan. Hasil penelusuran dengan menggunakan kata kunci pelayanan terpadu semakin menguatkan argumen tersebut. Kata pelayanan terpadu banyak ditemukan di BAB V tetapi tidak ditemukan yang berkaitan langsung dengan kecamatan.

Tabel 29 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
Tidak ada	Tidak ada	persentase kecamatan dan kelurahan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 14 dari 15 kecamatan pada tahun 2019	Peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan dan RT/RW	Program Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan

Penelusuran pada BAB VII dengan kata kunci kecamatan telah menunjukkan hasil yang lebih jelas. Pada kebijakan umum sasaran ke-40 dituliskan peningkatan pelayanan kecamatan, kelurahan dan RT/RW. Indikator kinerja yang digunakan pada bab ini yaitu Jumlah/% kecamatan/ kelurahan yang meningkat kinerja pelayanannya sebesar 100%. Pada tahun 2019 target kinerja yang tertulis adalah 15 dari 15 kecamatan di Kota Makassar meraih ISO. Sasaran ini diupayakan dalam program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan. Indikator pada BAB VII sedikit berbeda dengan indikator yang tercantum pada BAB VIII RPJMD Kota Makassar yaitu 14 dari 15 kecamatan di

Kota Makassar meraih ISO. Selengkapnya perbandingan indikator pada BAB V, VII dan VII dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
persentase kecamatan dan kelurahan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 14 dari 15 kecamatan pada tahun 2019	Jumlah/% kecamatan/kelurahan yang meningkat kinerja pelayanannya	35,7% (5 dari 14 kecamatan meraih ISO)	100% (15 dari 15 kecamatan meraih ISO)	Jumlah/% kecamatan/kelurahan yang meningkat kinerja pelayanannya	93,33% (14 dari 15 Kecamatan meraih ISO)

(22) Modernisasi Pelayanan Pajak dan Distribusi

Penelusuran untuk sub misi ini menggunakan kata kunci pajak. Hasil penelitian dengan kata kunci pajak pada BAB V Sub misi ini tidak ditemukan pada semua tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran. Pada penelusuran pada BAB VII, kata kunci pajak ditemukan pada salah satu indikator kinerja sasaran ke-50 jumlah sumber pajak yang efektif dimanfaatkan (Tax-based policy), persentase capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah, dan jumlah sumber pendapatan yang dapat diintegrasikan secara on-line. Dari tiga indikator tersebut, indikator ketiga lebih sesuai dengan sub misi modernisasi pelayanan pajak dan retribusi. Jumlah sumber pendapatan yang dapat diintegrasikan secara on-line ditargetkan meningkat dari 2 jenis pajak pada tahun 2014 menjadi 8 jenis pajak pada tahun 2019. Indikator ini juga ditemukan dengan target yang sama pada BAB VIII RPJMD Kota Makassar. Target ini diupayakan melalui Program Koordinasi

Perencanaan, Pengkajian, Pengembangan dan Pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah.

(23) Pengembangan Akses Internet pada Ruang Publik

Pengembangan akses internet pada ruang publik dapat ditemukan pada BAB V dalam tujuan ke sebelas yaitu peningkatan kinerja pelayanan publik. Pada sasaran ke-47 disebutkan meningkatnya kualitas pelayanan informasi. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase cakupan ruang publik yang mendapatkan layanan wifi gratis adalah sebanyak 10 titik di tahun 2019.

Tabel 31 Penjabaran Visi dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kebijakan	Program
Peningkatan kinerja pelayanan publik	meningkatnya kualitas pelayanan informasi	Cakupan ruang publik yang mendapatkan layanan wifi gratis sebanyak 10 titik pada tahun 2019	Gerakan smart-city	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pada BAB VII, sasaran meningkatnya kualitas pelayanan informasi diupayakan melalui kebijakan gerakan smart city dan turunkan pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Indikator kinerja pada BAB VII dan BAB VIII untuk yaitu jumlah unit ruang publik yang terfasilitasi akses wifi sebanyak 50 titik pada tahun 2019.

Tabel 32 Perbandingan Indikator Kinerja pada Dokumen RPJMD Kota Makassar

Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja Program	
BAB V	BAB VII			BAB VIII	
	Indikator	2014	2019	Indikator	2019
Cakupan ruang publik yang	Jumlah unit ruang publik	10 titik	50 titik	Jumlah unit ruang publik	50 titik

mendapatkan layanan wifi gratis sebanyak 10% pada tahun 2019	yang terfasilitasi akses wifi (Internet)			yang terfasilitasi akses wifi (Internet)	
--	--	--	--	--	--

(24) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah

Penelusuran penguatan BUMD ini menggunakan kata kunci Badan Usaha Milik Daerah dan BUMD. Hasil penelusuran pada BAB V, VII dan VIII menunjukkan jika penguatan BUMD ini tidak ditemukan di tujuan, sasaran, kebijakan program maupun indikator kinerja di RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019. Dapat dipastikan bahwa sub misi penguatan BUMD pada RPJMD Kota Makassar tidak memiliki indikator kinerja.

4.3. Pencapaian Kinerja Sub Misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019

Pada bagian sebelumnya diungkapkan analisis RPJMD Kota Makassar dengan mengungkapkan indikator keberhasilan program berdasarkan penelusuran pada indikator kinerja sasaran, indikator kinerja kebijakan dan indikator kinerja program. Pada bagian ini akan diuraikan pencapaian kinerja sub Misi RPJMD Kota Makassar menggunakan data sekunder yang hasil evaluasi RPJMD Kota Makassar yang diperoleh dari Bappeda Kota Makassar. Data tersebut menggunakan indikator kinerja program dalam mengevaluasi RPJMD sehingga rujukan utama yang digunakan adalah indikator kinerja program sebagaimana dibahas dalam BAB VIII RPJMD Kota Makassar. Meski demikian, analisis tetap dilaksanakan dengan memerhatikan substansi sub misi RPJMD Kota Makassar berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya. Hasil analisis diuraikan sbb:

Misi 1 Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia

Pada misi pertama terdapat delapan sub misi yaitu pengurangan pengangguran, pemberian jaminan sosial keluarga, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan pendidikan gratis, penukaran sampah dengan beras, pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, pembangunan rumah murah, dan pengembangan kebun kota. Data yang tersedia untuk mengevaluasi kebijakan tersebut hanya data pencapaian di tahun 2017. Untuk itu maka data dari dokumen perencanaan pada BAB VIII RPJMD Kota Makassar masih dicantumkan khususnya target indikator kinerja program pada tahun 2017.

Dari delapan sub misi yang terdapat pada Misi 1, 4 diantaranya memenuhi atau melampaui target pencapaian pada tahun 2017, tiga tidak memenuhi target kinerja dan satu tidak dapat diukur keberhasilannya. Sub misi yang memenuhi target adalah pengurangan pengangguran dengan target 25.020 orang dan realisasi dengan angka yang sama yaitu 25.020 orang, pelayanan kesehatan gratis dengan target 85% penduduk mendapat pelayanan kesehatan dasar dan realisasi sebesar 89,34%, pemberian keterampilan dan dana bergulir dengan target jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN sebanyak 11.200 orang dan dengan realisasi 11.239 orang, dan pengembangan kebun kota dengan target 100 lorong yang memiliki vertical garden dan realisasi mencapai 500 lorong.

Tiga program yang tidak memenuhi target adalah pemberian jaminan sosial keluarga dengan target kinerja cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas sebesar 30% dan realisasi pencapaian sebesar 25,02%,

penukaran sampah dengan beras dengan target 159 ton sampah dan realisasi 0 ton sampah, dan pelayanan pendidikan gratis dengan target 5% peserta didik yang mendapatkan deposito pendidikan dan realisasi pencapaian 0%. Sub misi yang tidak dapat diukur keberhasilannya adalah program pembangunan rumah murah. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya data mengenai target indikator kinerja program untuk sub misi tersebut pada tahun 2017 dalam dokumen program RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019. Data selengkapnya mengenai pencapaian kinerja misi 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33 Pencapaian Indikator Kinerja Misi 1 pada tahun 2017

No.	Sub Misi	Indikator Kinerja Program	Baseline 2014	Target Akhir Tahun RPJMD	Target 2017	Pencapaian di tahun 2017
1	Pengurangan Pengangguran	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	14.545 orang	29.280 orang	25.020	25.020 orang
2	Pemberian Jaminan Sosial Keluarga	Cakupan Jaminan Sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas	0%	50%	30%	25,02%
3	Pelayanan Kesehatan Gratis	Percentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	50%	100%	85%	89,34%

4	Pelayanan Pendidikan Gratis	Percentase peserta didik yang mendapatkan deposito pendidikan	0%	10%	5%	0%
5	Penukaran Sampah dengan Beras	Sampah tukar beras	657 ton	2.497 Ton Sampah	159 ton sampah	0 ton
6	Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Dana Bergulir	Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi spesifik level ASEAN	4.877 orang	90%	11.200 orang	11.239 orang
7	Pembangunan Rumah Murah	Jumlah dan % korban kebakaran dan bencana lainnya yang mendapatkan bantuan rumah model knock down	265 unit	100 unit	Tidak ada data	3 unit
8	Pengembangan Kebun Kota	Jumlah lorong yang memiliki vertical garden	0	800 lorong	100 lorong	500 lorong

Misi 2. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia

Pada misi kedua terdapat delapan sub misi yaitu penyelesaian masalah banjir, pembentukan badan pengendali pembangunan kota, pembangunan waterfront city, penataan transportasi publik, pengembangan infrastruktur kota, pengembangan pinggiran kota, pengembangan taman tematik, penataan lorong. Data yang tersedia untuk mengevaluasi kebijakan tersebut hanya data pencapaian di tahun 2017. Untuk itu maka data dari dokumen perencanaan pada BAB VIII RPJMD Kota Makassar masih dicantumkan khususnya target indikator kinerja program pada tahun 2017.

Dari delapan sub misi yang terdapat pada Misi 2, 3 diantaranya tidak akan dibahas pada bagian pencapaian kinerjanya, hanya ada satu yang memenuhi target kinerja, 2 sub misi yang tidak tercapai sasaran kinerjanya, dan 2 submisi yang tidak dapat diukur kinerjanya. 3 sub misi yang tidak dibahas adalah pembentukan badan pengendali pembangunan kota, pengembangan pinggiran kota, dan penataan lorong. Masing-masing sub misi ini tidak dibahas karena tidak terdapat indikator kinerjanya pada dokumen RPJMD Kota Makassar sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan indikator kinerja program. Satu-satunya sub misi yang indikator kinerja programnya memenuhi target adalah sub misi adalah penyelesaian masalah banjir. Meski terdapat perbedaan indikator yang tertulis pada dokumen RPJMD dan dokumen hasil evaluasi RPJMD dari Bappeda Kota Makassar tetapi secara substansi terhitung sama. Di dokumen RPJMD tertulis target pada tahun 2017 adalah mengurangi 5 titik genangan sementara di hasil evaluasi tertulis 20 titik genangan. Angka 20 titik genangan pada dokumen hasil evaluasi RPJMD diperoleh dari pengurangan titik genangan dari baseline 2014 dengan pencapaian pengurangan titik genangan setiap tahun mulai 2015, 2016 dan 2017. Jumlah genangan pada tahun 2014 sebanyak 31 titik genangan dan setelah pemerintah melakukan upaya pengurangan genangan sebanyak 5 titik di tahun 2017 ditambah dengan hasil pengurangan titik genangan di tahun sebelumnya maka sisa titik genangan pada tahun 2017 adalah sebanyak 20 titik.

Sub misi yang tidak tercapai target indikator kinerjanya adalah sub misi pengembangan infrastruktur kota yang menargetkan pembangunan jalan sepanjang 3 km dan 2 unit jembatan pada tahun 2017 sementara realisasinya adalah 2,85 km jalanan dan 2 unit jembatan. Sub misi lain yang tidak memenuhi target adalah sub misi pengembangan

taman tematik dengan indikator kinerja 2 taman tematik sementara ralisasinya 0 (nol) prada tahun 2017. 2 sub misi yang tidak dapat diukur pencapaian kinerjanya adalah sub misi pembangunan waterfornt city dan penataan transportasi publik. Dua sub misi ini tidak dapat diukur karena tidak adanya data target kinerja program pada tahun 2017 yang tercantum pada dokumen RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019. Data selengkapnya mengenai pencapaian kinerja misi 1 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34 Pencapaian Indikator Kinerja Misi 2 pada tahun 2017

No.	Sub Misi	Indikator Kinerja Program	Baseline 2014	Target Akhir Tahun RPJMD	Target 2017	Pencapaian di tahun 2017
9	Penyelesaian Masalah Banjir	Jumlah titik genangan yang dikurangi tinggi, luas dan lama genangan	34 Titik Genangan	10 titik	5 titik genangan	20 titik genangan
10	Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan Kota					
11	Pembangunan <i>Waterfront City</i>	Jumlah satuan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi water-front city yang berkembang	10.020 pohon mangrove dan 0 m ² padang lamun	sosek : 820 org, 2500 pohon	Tidak ada data	1.070 orang
12	Penataan Transportasi Publik	Persentase Prasarana Perhubungan Darat yang mendukung moda transportasi publik	54%	85%	Tidak ada data	79,14%

13	Pengembangan Infrastruktur Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun	Jalan = 0 Km, Jembatan 3 Unit	7,8 km jalan dan 8 unit jembatan	3 km jalan dan 2 unit jembatan	2,85 km jalan dan 2 unit jembatan
		Jumlah panjang dan persentase box culvert yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana integrasi utilitas	0 km	75 Km box culvert yang terpasang dan berfungsi sebagai sarana intagrasи utilitas pada tahun 2016	Tidak ada data	41,77 km
14	Pengembangan Pinggiran Kota					
15	Pengembangan Taman Tematik	Jumlah dan luas taman tematik yang dikembangkan	0 taman	8 taman	2 taman	0 taman
16	Penataan Lorong					

Misi 3. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi

Pada misi ketiga terdapat delapan sub misi yaitu: peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, peningkatan pelayanan di kelurahan, pelayanan publik langsung ke rumah, pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, pengembangan akses internet pada ruang publik, penguatan BUMD. Data yang tersedia untuk mengevaluasi kebijakan tersebut hanya data pencapaian di tahun 2017. Untuk itu maka data dari dokumen perencanaan pada BAB VIII RPJMD Kota Makassar masih dicantumkan khususnya target indikator kinerja program pada tahun 2017. Dari delapan sub misi

tersebut, 3 sub misi tidak akan dibahas pencapaian kinerjanya, hanya ada satu sub misi yang memenuhi target kinerja pada tahun 2017, dan empat sub misi tidak dapat diukur kinerjanya.

Sub misi yang tidak dibahas adalah sub misi peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, peningkatan pelayanan di kelurahan, dan penguatan BUMD. Masing-masing sub misi ini tidak dibahas karena tidak terdapat indikator kinerjanya pada dokumen RPJMD Kota Makassar sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan indikator kinerja program. Satu-satunya sub misi yang indikator kinerja programnya memenuhi target adalah sub misi adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Indikator kinerja program yang ditargetkan untuk program ini pada tahun 2017 adalah jumlah sumber pajak yang efektif dimanfaatkan adalah 2 jenis pajak dan 1 retribusi. Pencapaian indikator kinerja untuk tahun 2017 sama dengan yang ditargetkan yaitu 2 jenis pajak dan 1 retribusi.

Empat sub misi yang belum dapat diukur kinerjanya adalah pelayanan publik langsung ke rumah, pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, modernisasi pelayanan pajak dan retribusi, pengembangan akses internet pada ruang publik. Untuk sub misi pelayanan publik langsung ke rumah dan sub misi pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, tidak tersedia data indikator kinerja program pada tahun 2017 di dokumen RPJMD dan tidak tersedia data pencapaian kinerja pada tahun 2017. Untuk sub misi modernisasi pelayanan pajak dan retribusi, tidak tersedia indikator kinerja program pada tahun 2017 tetapi tersedia data jumlah sumber pendapatan yang dapat diintegrasikan secara online sebanyak 2 jenis pajak. Untuk sub misi pengembangan akses internet pada ruang publik, target indikator kinerja pada tahun 2017 adalah jumlah unit ruang publik yang terfasilitasi akses wifi sebanyak 10 titik.

Sayangnya tidak ada data mengenai pencapaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2017. Data selengkapnya mengenai pencapaian kinerja sub misi ketiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35 Pencapaian Indikator Kinerja Misi 3 pada tahun 2017

No.	Sub Misi	Indikator Kinerja Program	Baseline 2014	Target Akhir Tahun RPJMD	Target 2017	Pencapaian di tahun 2017
17	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah sumber pajak yang efektif dimanfaatkan (<i>tax-based policy</i>)	1 jenis pajak	11 pajak dan 2 retribusi	2 jenis pajak dan 1 retribusi	2 pajak dan 1 retribusi
18	Peningkatan Etos dan Kinerja Aparat RT/RW					
19	Peningkatan Pelayanan di Kelurahan					
20	Pelayanan Publik Langsung ke Rumah	Persentase Layanan Kesehatan Langsung ke Rumah 24 Jam/Home care	Tidak ada data	100%	Tidak ada data	Tidak ada data
21	Pengembangan Pelayanan Publik Terpadu di Kecamatan	Jumlah/% kecamatan/kelurahan yang meningkat kinerja pelayanannya	35,7% (5 dari 14 kecamatan meraih ISO)	93,33% (14 dari 15 Kecamatan meraih ISO)	Tidak ada data	Tidak ada data
22	Modernisasi Pelayanan Pajak dan Distribusi	Jumlah sumber pendapatan yang dapat diintegrasikan secara on-line	2 jenis pajak	8 jenis pajak	Tidak ada data	2 jenis pajak

23	Pengembangan Akses Internet pada Ruang Publik	Jumlah unit ruang publik yang terfasilitasi akses wifi (Internet)	10 titik	50 titik	10 titik	Tidak ada data
24	Penguatan BUMD					

Dari ke-24 sub misi yang ada pada RPJMD Kota Makassar, pencapaian kinerja dapat dikategorisasi sbb:

1. Sub misi yang memenuhi atau melampaui target. Ada enam sub misi yang masuk kategori ini yaitu pengurangan pengangguran, pelayanan kesehatan gratis, pemberian keterampilan dan dana bergulir, pengembangan kebun kota, penyelesaian masalah banjir, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Sub misi yang tidak memenuhi target. Ada lima program yang tidak memenuhi target yaitu pemberian jaminan sosial keluarga, penukaran sampah dengan beras, pelayanan pendidikan gratis, pengembangan taman tematik, pengembangan infrastruktur kota.
3. Sub misi yang belum dapat diukur keberhasilannya. Ada tujuh sub misi yang masuk kategori ini yaitu program pembangunan rumah murah, pembangunan waterfront city, penataan transportasi publik, pelayanan publik langsung ke rumah, pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, modernisasi pelayanan pajak dan retribusi, dan pengembangan akses internet pada ruang publik.
4. Sub misi yang tidak dibahas karena tidak memiliki indikator kinerja pada dokumen RPJMD. Ada enam sub misi yang masuk kategori ini yaitu pembentukan badan pengendali pembangunan kota, pengembangan pinggiran kota, penataan lorong,

peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, peningkatan pelayanan di kelurahan, dan penguatan BUMD.

4.4. Analisis Keberlanjutan Program RPJMD

Bagian dimaksudkan untuk merumuskan rekomendasi mengenai program apa saja yang masih perlu untuk dilanjutkan pada RPJMD periode selanjutnya. Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sub misi RPJMD Kota Makassar yang pada akhirnya akan dikategorikan menjadi dua poin yaitu sub misi direkomendasikan untuk dilanjutkan, atau sub misi direkomendasikan untuk dihentikan. Dua indikator yang digunakan untuk merumuskan rekomendasi tersebut yaitu keterkaitan program dengan isu-isu strategis yang terdapat pada rencana pembangunan jangka panjang Kota Makassar dan hasil evaluasi efektivitas program dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hasil analisis diungkapkan sbb:

Misi 1. Merekonstruksi Nasib Rakyat Menjadi Masyarakat Sejahtera Standar Dunia

(1) Pengurangan Pengangguran

Isu pada RPJP Daerah yang berkaitan dengan pengurangan pengangguran adalah Masih besarnya jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Jumlah ini juga banyak diisi oleh pencari kerja dari luar Kota Makassar. Isu ini dianggap akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan hingga tahun 2025. Jika dilihat dari segi efektivitas, program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai turunan dari sub misi ini dinilai efektif dalam mengurangi pengangguran. Untuk itu, sub

misi pengurangan pengangguran dapat direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan pada RPJMD Kota Makassar periode selanjutnya

(2) Pemberian Jaminan Sosial Keluarga

Indikator kinerja dari sub misi ini yaitu cakupan jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan penyandang disabilitas. Isu pada dokumen RPJP Kota Makassar yang terkait dengan sub misi ini adalah anak jalanan dan penyandang, masalah kesejahteraan sosial terus bertambah. Selain disebabkan oleh, masalah sosial perkotaan, sebagian dari PMKS merupakan migran dari luar kota. Isu tersebut menekankan PKMS sebagai salah satu permasalahan yang akan dihadapi pemerintah Kota Makassar hingga tahun 2025. Salah satu jenis PMKS adalah penyandang disabilitas. Untuk itu penting bagi pemerintah Kota Makassar untuk terus menyediakan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sub misi pemberian jaminan sosial keluarga, indikator kinerja program ini belum sepenuhnya efektif karena belum memuhi target yang ditetapkan. Meski demikian jika diperhatikan pada angka capaian kinerja pada tahun 2017 mencapai 77% sehingga masih memungkinkan untuk dimaksimalkan pencapaian programnya. Dengan memperhatikan keterkaitan dengan isu pada RPJPD dan efektivitas program yang masih dapat dimaksimalkan maka sub misi pemberian jaminan sosial keluarga khususnya untuk keluarga miskin dan penyandang disabilitas masih dapat direkomendasikan untuk dilanjutkan

(3) Pelayanan Kesehatan Gratis

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebesar 100% pada tahun 2019. Isu yang terkait dengan masalah pelayanan kesehatan pada RPJP Kota Makassar adalah tingkat pelayanan

kesehatan masyarakat masih rendah dan isu pertambahan penduduk yang berpotensi memunculkan tantangan rendahnya kualitas kesehatan penduduk. Dari segi efektivitas, pencapaian kinerja program ini melampaui target yang ditetapkan sehingga dianggap sangat efektif. Program ini dinilai masih dapat diandalkan dalam mengatasi masalah-masalah yang dijelaskan pada RPJP yang berkaitan dengan isu kesehatan. Untuk itu, program ini masih direkomendasikan untuk dilanjutkan.

(4) Pelayanan pendidikan gratis

Indikator program ini adalah persentase peserta didik yang mendapatkan deposito pendidikan gratis sebesar 10% dari seluruh siswa SD/SMP di Kota Makassar. Dari hasil penelusuran terhadap dokumen RPJP, tidak ditemukan adanya isu yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan pendidikan gratis. Dari segi efektivitas program, program deposito pendidikan gratis merupakan salah satu program yang tidak berjalan sama sekali. Dari target 5% yang ditetapkan pada tahun 2017, realisasi program sebesar 0%. Dari dua perspektif tersebut maka pelayanan pendidikan gratis direkomendasikan tidak dilanjutkan

(5) Program sampah ditukar beras

Isu yang berkaitan dengan sub misi ini pada RPJP Kota Makassar adalah masih buruknya perilaku masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah. Berkaitan dengan isu tersebut maka dinilai penting adanya program yang dapat memotivasi masyarakat untuk mengelola dan membuang sampah. Program yang tetapkan pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi isu ini adalah program sampah ditukar beras. Dari segi keterkaitan dengan isu, program ini dapat menjadi jalan untuk isu perilaku membuang sampah masyarakat. Meski demikian dari segi efektivitas, hasil

evaluasi menunjukkan jika program ini tidak efektif. Dari target 159 ton sampah yang direncanakan untuk ditukar dengan beras, realisasi pada tahun 2017 adalah 0 atau tidak terealisasi. Untuk itu, rekomendasi untuk program ini dapat berupa program dilanjutkan dengan jaminan diimplementasikan dengan baik atau dapat juga tidak dilanjutkan tetapi tetap mencari program yang dapat memotivasi masyarakat untuk membuang dan mengelola sampah.

(6) Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Dana Bergulir

Isu yang berkaitan dengan sub misi ini masih berkaitan dengan isu ketenagakerjaan sebagaimana dijelaskan pada sub misi pertama. Dari segi keterkaitan, sub misi ini sangat terkait dengan isu yang masih akan dihadapi Kota Makassar hingga tahun 2025 sehingga program peningkatan keterampilan dinilai masih relevan. Dari segi efektivitas, pencapaian kinerja program ini melampaui target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 sehingga dinilai sangat efektif. Berdasarkan pertimbangan keterkaitan dengan isu di RPJP dan efektivitas program dalam menyelesaikan isu maka sub misi ini dapat direkomendasikan dilanjutkan.

(7) Pembangunan Rumah Murah

Isu yang terkait dengan program ini adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah atau tinggal pada rumah tidak layak huni masih banyak, khususnya pada rumah tangga miskin. Dalam RPJMD Kota Makassar program pembangunan rumah murah tidak ditemukan dalam kebijakan atau program manapun. Kebijakan yang dapat dinilai bersesuaian dengan sub misi ini adalah bantuan bantuan rumah model knock down bagi korban kebakaran dan bencana lainnya. Jika dibandingkan antara isu dengan kebijakan yang dilakukan maka kebijakan yang ada saat ini tidak dapat diandalkan untuk

menyelesaikan persoalan rumah tangga miskin yang tidak memiliki rumah. Efektivitas program bantuan rumah model knock down juga tidak efektif karena hanya ada 3 unit rumah yang dibangun pada tahun 2017 sementara total jumlah rumah yang akan dibangun selama lima tahun adalah 100 unit rumah. Untuk itu sub misi pembangunan rumah murah model knock down tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan.

(8) Pengembangan Kebun Kota

Isu yang berkaitan langsung dengan pengembangan kebun kota tidak ditemukan dalam RPJP Kota Makassar. Meski demikian, jika dilihat pada program turunan pengembangan kebun kota dalam bentuk lorong garden maka program ini dapat dinilai sebagai bagian dari penataan kawasan pemukiman. Dari segi efektivitas, program ini sangat efektif karena pencapaian kinerjanya jauh melampaui yang ditargetkan. Dengan demikian program pengembangan kebun kota ini direkomendasikan untuk dilanjutkan.

Tabel 36 Keterkaitan isu dengan RPJP dan Efektivitas Sub Misi 1

No.	Sub Misi	Isu terkait dengan RPJP	Efektivitas	Rekomendasi
1	Pengurangan Pengangguran	Masih besarnya jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Jumlah ini juga banyak diisi oleh pencari kerja dari luar Kota Makassar	Efektif	Dilanjutkan
2	Pemberian Jaminan Sosial Keluarga	Anak Jalanan dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial terus bertambah. Selain disebabkan oleh masalah sosial perkotaan, sebagian dari PMKS merupakan migran dari luar kota.	76%	Dilanjutkan

3	Pelayanan Kesehatan Gratis	tingkat pelayanan kesehatan masyarakat masih rendah dan isu pertambahan penduduk yang berpotensi memunculkan tantangan rendahnya kualitas kesehatan penduduk	Tidak efektif	Tidak dilanjutkan
4	Pelayanan Pendidikan Gratis	Tidak ada isu	Tidak efektif	Tidak dilanjutkan
5	Penukaran Sampah dengan Beras	Kesadaran masyarakat untuk membersihkan sampah di tempat umum masih sangat rendah.	Tidak efektif	Dilanjutkan
6	Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Dana Bergulir	Masih besarnya jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.	Efektif	Dilanjutkan
7	Pembangunan Rumah Murah	rumah tangga yang tidak memiliki rumah atau tinggal pada rumah tidak layak huni masih banyak, khususnya pada rumah tangga miskin	Tidak efektif	Tidak dilanjutkan
8	Pengembangan Kebun Kota	Penataan kawasan pemukiman	Efektif	Dilanjutkan

Misi 2. Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia

(9) Penyelesaian Masalah Banjir

Isu yang terkait dengan masalah banjir pada dokumen RPJP Kota Makassar adalah terkait dengan efektivitas kanal dan drainase dalam mengalirkan air, serta sedimentasi yang menyebabkan terjadinya genangan. Dari segi efektivitas, program yang merupakan turunan dari sub misi ini dinilai efektif dalam mengurangi titik genangan 34 titik menjadi 20 titik pada tahun 2017. Untuk itu, sub misi penyelesaian masalah banjir masih direkomendasikan untuk dilanjutkan.

(10) Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan Kota

Dalam dokumen RPJP Kota Makassar, tidak ditemukan adanya Isu yang terkait dengan perlunya pembentukan Badan Pengendali Pembangunan Kota. Dari segi efektivitas, sub misi ini termasuk sub misi yang bermasalah sejak dari dokumen perencanaan karena tidak ditemukan dalam RPJMD kecuali pada bagian sub misi itu sendiri sendiri sehingga dapat dipastikan program ini tidak berjalan. Untuk itu, sub misi ini direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan.

(11) Pembangunan *water fornt city*

Indikator kinerja untuk pembangunan water front city ini adalah jumlah satuan fungsi ekonomi, sosial dan ekologi water-front city yang berkembang sebanyak 820 orang dan 2500 pohon mangrove. Isu yang terkait dengan masalah ini adalah belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau, termasuk kordinasinya dengan pemenuhan pelayanan dasar, serta masih kurangnya pelestarian ekosistem laut dan pesisir yang berefek pada degradasi lingkungan pesisir khususnya mangrove yang terus menyusut. Dari segi efektivitas, program ini masih terbatas pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir uang melampaui target pada tahun 2017. Belum ada data mengenai pelestarian ekosistem laut dan pesisir. Untuk itu, dengan melihat pentingnya pelestarian ekosistem laut dan pesisir maka program pembangunan water front city direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan catatan lebih fokus pada pelestarian lingkungan pesisir.

(12) Penataan transportasi publik

Isu yang berkaitan dengan penataan transportasi publik pada dokumen RPJP Kota Makassar adalah belum berkembangnya sistem angkutan massal yang terkelola sebagai

moda transportasi modern berbasis teknologi komunikasi dan informatika. Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan program ini adalah persentase prasarana perhubungan darat yang mendukung moda transportasi publik. Indikator tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan isu pada RPJP Kota Makassar khususnya pada penekanan moda transportasi modern berbasis teknologi komunikasi dan informatika. Meski demikian, karena masih adanya masalah yang belum terselesaikan maka penataan transportasi publik masih perlu untuk dilanjutkan. Dari segi efektivitas, program penataan transportasi publik sudah cukup efektif. Untuk itu, sub misi ini direkomendasikan untuk dilanjutkan pada RPJMD periode selanjutnya.

(13) Pengembangan Infrastruktur Kota

Isu yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur kota adalah populasi yang terus bertambah dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang sehingga penataan dan pemenuhan infrastruktur kota terus menjadi tantangan pemerintah. Selain itu, pembangunan merupakan salah satu tugas dasar pemerintah sehingga pengembangan infrastruktur kota harus selalu dilanjutkan. Dari segi efektivitas, program pembangunan infrastruktur kota dapat dinyatakan cukup efektif karena pencapaian kinerja pada tahun 2017 sudah mendekati persentase yang ditargetkan pada akhir tahun RPJMD. Dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan isu di RPJP dan efektivitas penyelenggaraan program maka sub misi ini direkomendasikan untuk dilanjutkan

(14) Pengembangan Pinggiran Kota

Isu yang terkait dengan pengembangan pinggiran kota pada RPJP Kota Makassar adalah isu tentang sarana dan prasarana kesehatan, dan penataan pemukiman di pinggiran kota. Dalam dokumen RPJMD, pengembangan pinggiran kota tidak diuraikan lebih lanjut

sehingga data mengenai pencapaian pengembangan pinggiran kota tidak ditemukan. Data yang tersedia hanyalah penataan pinggiran kanal yang tidak selalu berkorelasi dengan penataan pinggiran kota. Untuk itu, sub misi pengembangan pinggiran kota dalam pemahaman pinggiran kanal tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan.

(15) Pengembangan Taman Tematik

Isu yang berkaitan dengan pengembangan taman tematik pada RPJP Kota Makassar adalah kawasan terbuka hijau masih terbatas, luasnya belum mencapai batas minimal untuk sebuah kota. jalur swasta, pemerintah maupun komunitas belum optimal mengembangkan taman kota. Dari segi efektivitas, hasil evaluasi RPJMD menunjukkan bahwa program ini tidak efektif karena tidak adanya taman tematik yang dibangun pada tahun 2017 dari target 2 taman tematik yang direncanakan. Dengan memerhatikan fakta tersebut maka sub misi taman tematik tidak direkomendasikan. Meski demikian dalam RPJMD periode selanjutnya tetap perlu direncanakan pengembangan kawasan terbuka hijau yang bisa saja dalam bentuk taman atau hutan kota.

(16) Penataan Lorong

Isu yang berkaitan dengan penataan lorong dalam dokumen RPJP Kota Makassar adalah pemukiman yang belum tertata dengan baik. Dalam dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, penataan lorong spesifik pada pembuatan lorong garden. Dari segi efektivitas, program ini dinilai sangat efektif karena pencapaian indikator kinerjanya jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Dari 100 lorong yang ditargetkan pada tahun 2017, jumlah lorong garden yang terealisasi sebanyak 500 lorong pada tahun 2017. Dalam penataan kawasan pemukiman, pembuatan lorong garden direkomendasikan untuk dilanjutkan.

Tabel 37 Keterkaitan isu dengan RPJP dan Efektivitas Sub Misi 2

No.	Sub Misi	Isu terkait dengan RPJP	Efektivitas	Rekomendasi
9	Penyelesaian Masalah Banjir	efektivitas kanal dan drainase dalam mengalirkan air, serta sedimentasi yang menyebabkan terjadinya genangan	Efektif	Dilanjutkan
10	Pembentukan Badan Pengendali Pembangunan Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak dilanjutkan
11	Pembangunan <i>Waterfront City</i>	belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau, termasuk kordinasinya dengan pemenuhan pelayanan dasar, serta masih kurangnya pelestarian ekosistem laut dan pesisir yang berefek pada degradasi lingkungan pesisir khususnya mangrove yang terus menyusut	Belum efektif dalam pelestarian lingkungan pesisir	Dilanjutkan
12	Penataan Transportasi Publik	Belum berkembangnya sistem angkutan massal yang terkelola sebagai moda transportasi modern berbasis teknologi komunikasi dan informatika.	Cukup efektif	Dilanjutkan
13	Pengembangan Infrastruktur Kota	karena populasi yang terus bertambah tetapi juga karena perkembangan gaya hidup	Cukup Efektif	Dilanjutkan
14	Pengembangan Pinggiran Kota	sarana dan prasarana kesehatan, dan penataan pemukiman di pinggiran kota.	Tidak ada	Tidak dilanjutkan

15	Pengembangan Taman Tematik	kawasan terbuka hijau masih terbatas, luasnya belum mencapai batas minimal untuk sebuah kota. jalur swasta, pemerintah maupun komunitas belum optimal mengembangkan taman kota	Tidak efektif	Tidak dilanjutkan
16	Penataan Lorong	Penataan kawasan pemukiman	Efektif	Dilanjutkan

Misi 3. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi

(17) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Isu yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah tidak ditemukan dalam dokumen RPJP Kota Makassar. Meski demikian, peningkatan PAD merupakan tugas yang melekat bagi pemerintah daerah dan menjadi indikator kesuksesan pemerintah daerah. Untuk itu, segala program yang berkaitan dengan peningkatan PAD sudah semestinya dilanjutkan. Khusus untuk peningkatan PAD dalam dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, peningkatan PAD diupayakan melalui program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dari segi efektifitas, hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini dapat dinilai efektif karena pencapaian kinerjanya sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk itu, program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan.

(18) Peningkatan Etos dan Kinerja Aparat RT/RW

Isu yang berkaitan dengan peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW tidak ditemukan dalam dokumen RPJP Pemerintah Kota Makassar. Demikian halnya pada dokumen

RPJMD Kota Makassar pada tahun 2014-2019, peningkatan etos dan kinerja aparatur RT/RW juga tidak ditemukan. Untuk itu, sub misi ini direkomendasikan tidak dilanjutkan

(19) Peningkatan Pelayanan di Kelurahan

Isu yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan di kelurahan yaitu terbatasnya kapasitas pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanganan masalah spesifik lokal terkait pendataan kependudukan, penguatan RT/RW, penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), dan sebagainya. Selain itu, pelayanan publik merupakan salah satu tugas pokok dari pemerintah sehingga harus terus menerus dilaksanakan. Untuk itu, meskipun peningkatan pelayanan di kelurahan ditemukan dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, sub misi ini direkomendasikan tetap harus dilanjutkan dengan catatan perlu dituliskan dengan jelas indikator khusus yang terkait dengan peningkatan pelayanan di kelurahan pada dokumen RPJMD periode selanjutnya.

(20) Pelayanan Publik Langsung ke Rumah

Isu yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung ke rumah dalam dokumen RPJP terkait dengan isu pelayanan kesehatan yang masih rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan melalui pelayanan kesehatan langsung ke rumah. Dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, pelayanan kesehatan langsung ke rumah dijabarkan dalam kebijakan home care. Sayangnya di dokumen RPJMD tidak dijelaskan indikator kinerjanya. Demikian pula pada dokumen hasil evaluasi RPJMD dari Bappeda Kota Makassar juga tidak ditemukan data pencapaian program ini sehingga masih sulit untuk mengukur

efektivitas program. Meski demikian, program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan karena keterkaitannya dengan isu strategis pada dokumen RPJP Kota Makassar.

(21) Pengembangan Pelayanan Publik Terpadu di Kecamatan

Isu yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan publik terpadu di Kecamatan tidak ditemukan dalam dokumen RPJP Pemerintah Kota Makassar. Dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, pengembangan pelayanan publik terpadu dijelaskan dengan menggunakan indikator jumlah kecamatan yang meraih ISO. Adapun mengenai efektivitas pencapaian program masih belum dapat diukur karena tidak tersedia data pada dokumen RPJMD maupun dokumen evaluasi RPJDM Kota Makassar terkait pencapaian target tersebut pada tahun 2018. Meski demikian, seperti halnya dengan pelayanan di kelurahan, pelayanan merupakan tugas utama pemerintahan sehingga segala upaya untuk melakukan perbaikan layanan perlu untuk dilanjutkan.

(22) Modernisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi

Isu yang berkaitan dengan modernisasi pelayanan pajak dan retribusi tidak ditemukan dalam dokumen RPJP Pemerintah Kota Makassar. Dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, modernisasi pelayanan pajak dan retribusi dilaksanakan dalam bentuk integrasi sumber pendapatan pajak secara online. Adapun mengenai efektivitas pencapaian program untuk program ini dapat dinilai efektif karena telah memenuhi capaian kinerja. Untuk itu program ini direkomendasikan untuk dilanjutkan.

(23) Pengembangan Akses Internet pada Ruang Publik

Isu yang berkaitan dengan pengembangan akses internet pada ruang publik tidak ditemukan dalam dokumen RPJP Pemerintah Kota Makassar. Dalam dokumen RPJMD

Kota Makassar, pengembangan akses internet pada ruang publik dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi akses wifi di ruang publik. Efektivitas program ini tidak dapat diukur karena tidak terdapat data pada laporan evaluasi RPJMD mengenai capaian kinerja pada tahun 2017. Dengan berdasarkan pada fakta bahwa penyediaan akses internet tidak menjadi issu dalam dokumen RPJP Kota Makassar dan bukan pula merupakan tugas utama dari pemerintah maka direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan.

(24) Penguatan BUMD

Isu yang berkaitan dengan penguatan BUMD tidak ditemukan dalam dokumen RPJP Pemerintah Kota Makassar. Demikian pula dalam dokumen RPJMD Kota Makassar, penguatan BUMD tidak dijelaskan dalam bagian manapun kecuali di sub misi. Meski demikian, penguatan BUMD masih tetap dianggap bagian dari upaya meningkatkan pendapatan pendapatan daerah sehingga sub misi ini perlu dilanjutkan dengan catatan perlu dituliskan secara tegas dalam RPJMD periode selanjutnya.

Tabel 38 Keterkaitan isu dengan RPJP dan Efektivitas Sub Misi 3

No.	Sub Misi	Isu terkait dengan RPJP	Efektivitas	Rekomendasi
17	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Tidak ada	Efektif	Dilanjutkan
18	Peningkatan Etos dan Kinerja Aparat RT/RW	Tidak ada	Tidak ada	Tidak dilanjutkan

19	Peningkatan Pelayanan di Kelurahan	Terbatasnya kapasitas pemerintahan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat untuk penanganan masalah spesifik lokal terkait pendataan kependudukan, penguatan RT/RW, penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), dan sebagainya	Tidak ada data	Dilanjutkan
20	Pelayanan Publik Langsung ke Rumah	Persentase Layanan Kesehatan Langsung ke Rumah 24 Jam/Home care	Tidak ada data	Dilanjutkan
21	Pengembangan Pelayanan Publik Terpadu di Kecamatan	Tidak ada data	Tidak ada data	Dilanjutkan
22	Modernisasi Pelayanan Pajak dan Distribusi	Tidak ada data	Tidak ada data	Dilanjutkan
23	Pengembangan Akses Internet pada Ruang Publik	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak dilanjutkan
24	Penguatan BUMD	Tidak ada data	Tidak ada data	Dilanjutkan

Dari ke-24 sub misi yang ada pada RPJMD Kota Makassar, rekomendasi keberlanjutan sub misi dapat dirangkum sbb:

1. Sub misi yang direkomendasikan untuk dilanjutkan yaitu: pengurangan pengangguran, pemberian jaminan sosial keluarga, penukaran sampah dengan beras, pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir, pengembangan kebun kota, penyelesaian masalah banjir, pembangunan *waterfront city*, penataan transportasi publik, pengembangan infrastruktur kota, penataan lorong, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pelayanan di kelurahan, pelayanan publik langsung ke

rumah, pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan, modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, Penguatan BUMD.

2. Sub misi yang direkomendasikan tidak dilanjutkan yaitu: pelayanan kesehatan gratis, pelayanan pendidikan gratis, pembangunan rumah murah, pembentukan badan pengendali pembangunan kota, pengembangan pinggiran kota, pengembangan taman tematik, peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, dan pengembangan akses internet pada ruang publik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Indikator kinerja pada RPJMD Kota Makassar terdiri dari tiga indikator yaitu indikator kinerja sasaran pada BAB V, indikator kinerja kebijakan pada BAB VII dan indikator kinerja program pada BAB VIII. Di antara ketiga indikator tersebut ditemukan beberapa indikator yang tidak konsisten dan beberapa sub misi yang tidak memiliki indikator seperti: pembentukan badan pengendali pembangunan kota, pengembangan pinggiran kota, penataan lorong, peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, peningkatan pelayanan di kelurahan, dan penguatan BUMD.
2. Dari 24 sub misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2016, terdapat enam sub misi yang memenuhi atau melampaui target, lima sub misi tidak memenuhi target, tujuh sub misi yang tidak belum dapat diukur keberhasilannya secara jelas, dan enam sub misi yang tidak memiliki indikator kinerja pada RPJMD
3. Rekomendasi keberlanjutan sub misi didasarkan pada keterkaitan antara sub misi dengan isu-isu strategis yang terdapat pada RPJP Kota Makassar dan efektivitas program. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sub misi yang direkomendasikan tidak dilanjutkan yaitu: pelayanan kesehatan gratis, pelayanan pendidikan gratis, pembangunan rumah murah, pembentukan badan pengendali pembangunan kota, pengembangan pinggiran kota, pengembangan taman tematik, peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, dan pengembangan akses internet pada ruang publik.

5.2. Saran

1. Dokumen RPJMD sebaiknya dipastikan keselarasan antar indikator yang digunakan sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pengukuran keberhasilan program
2. Setiap program yang direncanakan di RPJMD sebaiknya dibuat indikator kinerja yang terukur setiap tahun sehingga lebih mudah untuk melakukan monitoring kinerja tahunan.
3. Sub misi/program yang tidak efektif dijalankan tetapi masih memiliki keterkaitan yang tinggi dengan isu-isu pada RPJP Kota Makassar maupun merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara umum sebaiknya diupayakan untuk diimplementasikan dengan lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Gaspersz, Vincent. 2003. Manajemen Bisnis Total - Total Quality Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mulyadi dan Johny Setyawan. 1999. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mulyadi. 2001. Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafrizal. 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Padang: Penerbit Baduose Media